



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

INDONESIA
menuju
COP21

Memperjuangkan
Kepentingan Nasional,
Berkontribusi pada
Upaya Global



COP21 • CMP11

PARIS 2015

UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE

Perubahan Iklim dan Dampaknya bagi Indonesia

Perubahan iklim yang sudah dirasakan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia (melalui cuaca ekstrem) disebabkan oleh pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena peningkatan volume gas rumah kaca di stratosfer yang membentuk lapisan dengan kemampuan menahan dan memantulkan kembali sinar matahari ke permukaan bumi. Para ahli dari 40 negara yang tergabung ke dalam IPCC melalui laporan AR4 menyerukan bahwa apabila konsentrasi gas rumah kaca mencapai 450 PPM, maka permukaan bumi secara global akan meningkat sebesar 2 derajat celsius. Peningkatan suhu tersebut akan menyebabkan ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan energy, ketahanan ekosistem akan terancam, termasuk di Indonesia.

Pada laporan IPCC AR5 yang dikeluarkan pada tahun 2013 menyebutkan bahwa permukaan bumi (daratan dan lautan) telah meningkat rata-rata sebesar 0,78oC dari masa periode 1850-1900 (50 tahun) ke masa periode 2003-2012 (sembilan tahun). Dari sisi curah hujan (presipitasi), laporan para ahli ini secara khusus menyebutkan bahwa dalam masa sepuluh tahun terakhir, di beberapa daerah di Indonesia telah menurun tingkat

curah hujan tahunan. Sedangkan kenaikan rata-rata permukaan air laut tahun 1901 – 2010 hanya 0.19 mm/tahun menjadi 3,2 mm/tahun pada periode 1993-2010.

Menurut pengamatan dari BMKG yang dipublikasikan tahun 2006, dalam 100 tahun terakhir, peningkatan konsentrasi GRK untuk CO₂ sebesar 1,5 ppm, CH₄ sebesar 2,4 ppb, N₂O sebesar 0,8 ppb dan SF₆ sebesar 0,7 ppt. BMKG juga mengukur peningkatan suhu permukaan laut sebesar 0,76oC dengan peningkatan permukaan laut sebesar 5-100 mm/tahun periode 1991 – 2000). Selain terjadinya serangkaian cuaca ekstrim di Indonesia, pembuktian lain dari BMKG (2006) adalah adanya pemanasan global di Indonesia adalah berkurangnya tutupan salju di Pegunungan Jaya Wijaya sebesar 7,5% pada periode 2002 – 2006.

Dampak dari pemanasan global di Indonesia sudah terjadi dan masyarakat telah merasakan dampaknya melalui berbagai kejadian akibat cuaca ekstrim, ditambah lagi karena letak Indonesia yang berda dalam 'Ring of Fire', Indonesia juga rentan terhadap bencana alam lainnya seperti erupsi gunung berapi dan gempa bumi yang memerlukan sumberdaya yang cukup besar untuk penanganannya. Cuaca ekstrim menyebabkan



bencana nasional seperti banjir di hampir semua kota besar, dan kekeringan di wilayah pertanian prioritas serta kebakaran hutan dan lahan. Kerugian ekonomi yang dirasakan dari banjir Jakarta Tahun 2007 sebesar 95 Milyar rupiah per hari (Kompas, 4 Januari 2007). Kereta Api Jabodetabek merugi lebih dari 800 juta rupiah, PT Telkom kehilangan potensi pendapatan sebesar 15-18 Milyar rupiah akibat 132 ribu jaringan terputus akibat dari banjir tersebut. Terdapat 37 ribu ha sawah terancam mengalami kekeringan di sejumlah daerah di Jawa Barat (Kompas, April 2015). Sebesar 5 – 6 Milyar USD total kerugian dari Kebakaran tahun 1997 (CIFOR, 1998) dan 935 Milyar Rupiah, total kerugian di Riau tahun 2014 (Worldbank, 2014). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2015) mencatat bahwa 98% dari total kejadian bencana per tahunnya adalah bencana hidrometeorologi (angin putting beliung, banjir, gelombang pasang, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan gelombang pasang) dan kerugian akibat bencana-bencana tersebut rata-rata Rp. 30 Trilyun per tahun.

Upaya Nasional

Upaya nasional dalam menurunkan emisi telah dilaksanakan melalui program Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN GRK) melalui Peperes No.61/2011 dan pemantauannya melalui Peperes No. 71/2011 tentang inventarisasi Gas Rumah Kaca . Dalam Peperes 61/2011 telah ditentukan program-program strategis penurunan emisi di lima sector utama yaitu kehutanan dan lahan gambut, energy, transportasi, pertanian dan pengelolaan limbah. Selain upaya memitigasi emisi, upaya beradaptasi juga telah dipersiapkan melalui prioritas penanganan berdasarkan pada peta kerentanan di seluruh propinsi di Indonesia. Disamping upaya di atas, banyak upaya dalam skala kecil oleh kelompok masyarakat baik yang memberikan manfaat baik dari sisi mitigasi maupun adaptasi.

Kenapa Paris sangat penting bagi Indonesia?

UNFCCC merupakan konvensi tentang kerangka kerja global untuk menstabilisasi konsentrasi gas rumah kaca pada level yang tidak membahayakan kehidupan manusia dan ekosistem (isi dari article dua convention), dan COP merupakan konverensi bagi para pemimpin dunia untuk menunjukkan komitmennya dalam upaya global tersebut. Konsisten dengan apa yang disepakati dalam COP-13 di Bali, pada tahun 2009 Indonesia secara sukarela menjalankan konvensi ini dengan menunjukkan niat baik dengan mengumumkan upaya menurunkan emisi sebesar 26% (dengan sumber dana sendiri) dan 41% (dengan bantuan internasional) dari emisi *business as usual* di tahun 2020.

Conference of the Parties (COP) 21 di Paris menjadi titik kulminasi dari pembahasan yang dimulai sejak lahirnya 'Durban Platform for Enhanced Actions' pada COP-17 tentang regim baru Kesepakatan Dunia dalam penanganan pemanasan global pasca 2020 yang berlaku bagi semua negara (Parties) dengan prinsip *Common but Differentiated Responcibility (CBDR) and respective capability*. Kesepakatan baru tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan nasional pasca 2020, terlebih karena sebagai bagian penting dari komitmen pasca 2020

adalah diserahkannya 'Intended Nationally Determined Contribution (INDC)'.

Sebagai negara kepulauan, dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi di ekosistem darat dan laut serta jumlah penduduk yang tinggi memiliki tingkat kerentangan yang tinggi pula terhadap dampak dari perubahan iklim. Kerugian akibat banjir, kekeringan dan kebakaran (pemicunya musim kering berkepanjangan) bukan hanya berdampak pada kehidupan perekonomian Negara dan masyarakat, namun juga berdampak pada ekosistem hutan dan laut. Kerugian dari perubahan iklim ini mempengaruhi ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, ketahanan budaya, ketahanan energi, ketahanan ketersediaan air tawar dan ketahanan keanekaragaman hayati. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dalam proses membangun di segala bidang. Tantangan bagi Indonesia adalah menjaga harmoni antara kepentingan mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berketahanan iklim dalam konteks keunikan archipelago, keragaman hayati, social-budaya, serta pertumbuhan dan sebaran umur populasi sampai tahun 2030/2050, dengan upaya global yang Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi.



Jalur Perjuangan

Kepentingan Indonesia di COP 21 dapat diperjuangkan melalui dua jalur utama, yaitu melalui negosiasi dan melalui program penjangkauan (*outreach*) dan kampanye, serta kombinasi keduanya

Jalur Negosiasi

Tugas Delegasi Indonesia dalam COP 21 sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan negara untuk dapat menjalankan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, dengan mengurangi secara signifikan tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim dan kemiskinan. Misi lain adalah mengajak semua negara pihak memberikan dan melaksanakan komitmen sesuai kondisi nasional dan kapasitas serta kapabilitasnya sesuai prinsip-prinsip dalam UNFCCC, dan terutama bagi negara maju disamping komitmen pengurangan emisi adalah komitmen penyediaan pendanaan perubahan iklim, pengembangan dan transfer teknologi serta peningkatan kapasitas bagi negara berkembang. Keadilan iklim dan kesempatan mencapai pembangunan berkelanjutan adalah merupakan kunci keberhasilan bagi tercapainya kesepakatan di Paris.

Jalur perundingan dapat berhasil apabila memenuhi prasyarat, termasuk pemahaman yang optimal terhadap isi dari setiap isu yang

berkaitan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional dapat diperoleh dari sumbangsih kementerian dan lembaga yang menguasai persoalan serta opsi-opsi pemecahannya. Melalui informasi tersebut, 'lead negotiator' dapat bekerjasama dengan tim dalam merumuskan posisi Indonesia yang sesuai dengan 'guidance' DELRI dan isi dari negosiasi yang sedang berjalan. Sebagai bagian dari proses negosiasi atau untuk menunjang keberhasilan negosiasi formal UNFCCC, pertemuan bilateral dan regional serta pertemuan kelompok negara sangat penting dalam membangun dan memperkuat posisi bersama dan memperjuangkan kepentingan nasional. Demikian juga halnya, Indonesia sangat penting untuk aktif dalam berbagai pertemuan terkait di luar proses UNFCCC, dan yang lebih penting lagi adalah komunikasi intensif berbagai pihak yang terlibat dalam berbagai forum yang berbeda namun saling terkait tersebut.

Jalur penjangkauan (*outreach*) dan kampanye

Jalur ini dapat digunakan untuk menginformasikan tentang misi Indonesia ke COP-21 Paris serta untuk tujuan lainnya. Jalur ini juga untuk menginformasikan capaian dan 'good practices', program dan aksi di masa mendatang dalam upaya mewujudkan pembangunan rendah karbon (mitigasi), penanganan kerentanan serta peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim (adaptasi) dari berbagai sector. Berbagai wahana dapat digunakan, mulai dari pertemuan khusus tingkat tinggi (High Level Events) dan pertemuan lainnya sampai pada pertemuan teknis maupun 'show cases'. Salah satu wadah yang akan digunakan adalah "Indonesia Pavillium" yang ditujukan untuk mempromosikan program-program terkait perubahan iklim Indonesia dan capaiannya secara kompherensif. Pavillium Indonesia dapat menjadi "meeting point" para pihak dari berbagai negara yang bergerak di bidang perubahan iklim, baik dari kalangan Pemerintah, swasta, NGOs, Pemerintah Sub-nasional, para pakar dll.

Memanfaatkan momentum negosiasi, '*outreach*' dan kampanye

Indonesia juga dapat memanfaatkan momentum COP 21 untuk menginformasikan kepada komunitas internasional tentang program pemerintah "NAWACITA". Menangani dampak dari perubahan iklim sangat erat kaitannya dengan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara dari ancaman kerusakan lingkungan dan perubahan iklim (Butir satu NAWACITA). Sejalan dengan semangat dari keputusan-keputusan UNFCCC yang mengaitkan dengan transparansi dan MRV, NAWACITA memprogramkan agar pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih (termasuk melawan Korupsi), efektif, demokratis, dan terpercaya (Butir Kedua dan Keempat). Terkait dengan adaptasi, NAWACITA juga telah memperhatikan program adaptasi masyarakat dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan (Butir ketiga). Dalam NAWACITA (butir kelima, keenam dan ketujuh) terutama membangun perekonomian secara mandiri dan merestorasi sosial Indonesia dapat diwujudkan dengan pemanfaatan jasa lingkungan secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini sangat sejalan dengan seruan dari keputusan-keputusan UNFCCC agar melakukan pemanfaatan ekosistem secara berkelanjutan.

Mempertimbangkan keselarasan dari tujuan konvensi UNFCCC dengan landasan pembangunan berkelanjutan nasional melalui NAWACITA tersebut di atas, Delegasi Indonesia memiliki tugas berat untuk memasukkan kepentingan nasional dalam agenda internasional perubahan iklim. Delegasi Indonesia diharapkan dapat solid dalam mengemban misi Indonesia di meja perundingan dan aktif mempromosikan hasil-hasil kegiatan prioritas dalam hal mitigasi dan adaptasi serta hambatan dan tantangan di masa mendatang.

National Focal Point (NFP) dan Tugasnya

Berdasarkan Keputusan COP 14/CP.2 melalui dokumen FCCC/SBI/1996 paragraph 29 dan FCCC/1996/8 paragraph 74, NFP memiliki tugas utama untuk menerima dokumen dari dan berkomunikasi dengan UNFCCC terkait dengan aspek-aspek penganggaran sekretariat UNFCCC, penyusunan laporan komunikasi nasional (national communication), menginformasikan mengenai pelaksanaan konvensi di tingkat nasional, serta menerima, menyetujui dan mengetahui seluruh kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan pihak lain dan melaporkannya kepada pertemuan para pihak (Conference of the Parties/COP) melalui sekretariat UNFCCC. Sebagai konsekuensi dari terbitnya PERPRES No. 16/2015 maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim) sebagai 'National Focal Point (NFP)' UNFCCC. Dalam menjalankan tugasnya NFP melakukan fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Mempersiapkan Delegasi Indonesia untuk persidangan-persidangan di bawah UNFCCC.
2. Bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga serta pemangku kepentingan terkait lainnya menyusun substansi posisi negosiasi maupun submisi Indonesia
3. Menyampaikan submisi Indonesia baik berupa posisi, dokumen pelaporan dan dokumen lainnya ke Sekretariat UNFCCC
4. Mengelola Kesekretariatan DELRI selama persidangan berlangsung
5. Mengkoordinasikan pelaporan hasil persidangan dan komunikasi tindak lanjut/implementasi oleh berbagai pihak.

Penutup

Penerapan regime pengendalian perubahan iklim global (termasuk Kyoto Protokol) yang menjalankan prinsip *Common but Differential Responsibility and Respective capabilities* (CBDR-RC) menuju 2020 belum berhasil mencapai target-target yang disepakati oleh Negara pihak konvensi UNFCCC. Temuan baru dari IPCC melalui Laporan Assessment Report ke-5 (AR5) membuktikan aksi-aksi mitigasi tidak banyak mengalami kemajuan dan mendorong setiap negara untuk serius dalam menjalankan program-program nasionalnya. COP21 ditargetkan akan menghasilkan regime penanganan perubahan iklim global baru yang akan mengikat semua negara pihak (*applicable to all*) dengan tetap memperhatikan prinsip

CBDR-RC. Keberhasilan dalam negosiasi dan penjangkauan dapat dibuktikan dengan seberapa jauh kepentingan Indonesia terakomodasi ke dalam kesepakatan/keputusan COP-21, meningkatnya pengakuan atas upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta upaya terkait lainnya, dan meningkatnya peluang yang dapat ditangkap dari skema-skema yang terbangun melalui kesepakatan/keputusan COP termasuk pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas institusi dan SDM. Semoga delegasi Indonesia dapat mengemban tugas memperjuangkan kepentingan bangsa di COP 21 Paris dan dalam waktu yang sama berkontribusi pada upaya global.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
Alamat Manggala Wanabakti Blok VII, Lantai 12; Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta-Indonesia; Telp.: (021) 570242; E-mail: ditjenppi@dephut.go.id